

DAFTAR REFERENSI

- Albernandes, Ridho. (2014). "Analisis efektivitas Dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir Kota Padang". Universitas Andalas. Padang.
- Bramantyo. 2013. Kena Pajak, Laba UKM Makin Tergerus. <http://economy.okezone.com/read/2013/08/15/320/850029/kena-pajak-laba-ukm-makin-tergerus> Diakses pada 10 Agustus 2015
- Burton, Richard. 2010. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.(2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. [online]. <http://pajak.go.id/Peraturan-Pemerintah-Nomor-46-Tahun-2013.html> diakses pada: 16 Juli 2015.
- Fieldmann, N.J. 1949. De overheidsmiddelen van Indonesia. Jakarta.
- Gunadi.(2007). *Akuntansi Perpajakan*. PT. Gramedia. Wydia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, Syarif. 2014. Pengenaan Pph Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Hal 1.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak.(2011). *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.
- Munawir.(2000). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.
- Poputra, Agus. (2014). "Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara". Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Rahman, Abdul. (2010). "Panduan Pelaksanaan Administrasi Untuk Karyawan Pelaku Bisnis dan Perusahaan". Bandung. Nuansa.
- Ramadani, Silvia. 2013. Erwin Aksa: Pajak UKM Prinsipnya Kemudahan. <http://economy.okezone.com/read/2013/11/16/20/898055/erwin-aksa-pajak-ukm-prinsipnya-kemudahan> Diakses pada 10 Agustus 2015
- Republik Indonesia. 1945. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23A amandemen ketiga tentang pemungutan pajak yang bersifat memaksa. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 12 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kemenkeu.

- Republik Indonesia. 1991. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1983. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan kedua UU No 7 Tahun 1983. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga UU No 7 Tahun 1983. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU No 6 Tahun 1983. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat UU No 7 Tahun 1983. Jakarta: Kemenkeu.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak pada usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Rosdiana, Haula. Edi Slamet Irianto (2012). *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan, dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sukardji.(2009). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono,(2003). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suprianto, Edy. (2010) *Perpajakan di Indonesia*” Graha Ilmu.
- Triantoro, Avian. (2010). “Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung”. Universitas Putra Indonesia. Bandung.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Soemihamidjaja, soeparman, (1964). *Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong*, Unpad, Bandung.